

Edukasi dan Implementasi Layanan Mediasi dalam Mengatasi Pelanggaran Tata Tertib Siswa di SMP Muhammadiyah 57 Medan

Imron Bima Saputra¹, Muhammad Luthfie Ramadhani², Nursyahrul Ritonga³, Roslaeni⁴, Indra Syah Putra⁵, Agus Salim⁶

^{1,2} Universitas Dharmawangsa, Indonesia

³ Politeknik Adiguna Maritim Indonesia (Poltek AMI) Medan, Indonesia

⁴ STAI Al-Ikhlas Dairi, Indonesia

⁵ Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

⁶ Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Corresponding Author : ✉ m.luthfieramadhanisuprpto@dharmawangsa.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the general picture of student disciplinary violations, implementation of education and understanding of rules, the process of implementing mediation services, and the effectiveness of mediation services in resolving violations. This community service (PkM) program involves determining the subject or target audience, implementing the activity, and collecting and analyzing data. This section explains how the team identifies problems, implements solutions, and measures the program's success in the field. Data collection methods include observation, interviews, and document review. Student disciplinary violations at SMP Muhammadiyah 57 Medan are still dominated by minor violations, indicating that some students have not yet optimally internalized the value of discipline. Efforts to educate and understand the rules have been implemented through socialization of disciplinary rules, classical guidance, coaching by guidance counselors, homeroom teachers, and subject teachers, thereby increasing students' understanding of the importance of discipline and responsibility. The implementation of mediation services is carried out systematically through problem identification, mediation processes, education, and follow-up, so that they not only function to resolve conflicts but also shape character, improve communication skills, and raise students' awareness to comply with school rules. Mediation services have proven effective in reducing disciplinary violations, improving interpersonal relationships, and strengthening a culture of discipline and Islamic character within SMP Muhammadiyah 57 Medan through collaboration between guidance counselors, the principal, homeroom teachers, teachers, and parents.

Keywords Education, Mediation Services, Violations of Student Conduct Rules.

PENDAHULUAN

Pada masyarakat yang semakin maju, masalah penemuan identitas pada individu menjadi semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh tuntutan masyarakat maju kepada anggota-anggotanya menjadi lebih berat, persyaratan untuk diterima menjadi anggota masyarakat bukan saja kematangan fisik, melainkan juga kematangan mental psikologi, kultural, vokasional, intelektual

dan *religious*. Kerumitan ini dapat meningkat terus pada masyarakat yang sedang membangun, sebab perubahan cepat yang terjadi pada masyarakat yang sedang membangun merupakan tantangan pula bagi individu dan siswa. Selain itu, pelanggaran nilai moral oleh remaja dapat dipandang sebagai perwujudan dan rendahnya disiplin diri sehingga mereka memiliki karakter negatif pemicu utamanya diduga adalah situasi dan kondisi keluarga yang negatif. Keadaan semacam inilah yang menuntut diselenggarakannya bimbingan dan konseling di sekolah (Sukardi, 2008).

Bimbingan konseling merupakan salah satu tempat atau wadah untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah-masalah terutama masalah kedisiplinan siswa. Melalui program dan penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan agar para siswa dapat menyadari akan kesalahan-kesalahan maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah kedisiplinan ini adalah layanan mediasi yang digunakan. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan guru pembimbing (konselor) terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan (Suhertina, 2008). Ketidakcocokan tersebut menjadikan mereka saling bermusuhan, menyimpan dendam, menjauhi pihak lain bahkan bisa saja saling menghancurkan.

Siswa di jenjang Sekolah Menengah Pertama masih berada pada masa peralihan atau masa remaja. Remaja adalah suatu tahapan perkembangan antara anak-anak dan masa dewasa, yang di tandai oleh perubahan-perubahan fisik umum serta perkembangan kognitif dan sosial (Desmita, 2008). Masa ini adalah masa yang rentan dengan masalah, baik itu masalah yang berasal dari diri sendiri maupun masalah yang berasal dari luar diri individu itu sendiri. Pada masa ini individu susah mengendalikan emosi, sering mengalami perselisihan dan terlibat dalam masalah dengan pihak lain. Permasalahan yang terjadi dengan pihak tersebut bisa diakibatkan oleh banyak hal, misalnya kecemburuan sosial, mudah tersinggung, emosi memuncak, perbedaan status sosial dan lain sebagainya. Hal inilah yang sering mengakibatkan perkelahian atau ketidakcocokan antara yang satu dengan sesama sangat dianjurkan karena tidak bisa hidup seorang diri, kita membutuhkan orang lain.

Konseling sangatlah penting dalam dunia pendidikan maupun di lingkungan masyarakat. Konseling merupakan suatu pendidikan yang memberikan pelayanan terhadap pendidikan. Senada dengan UU no. 20 tahun 2003 yang berbunyi tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir 6 yang menegaskan bahwa konselor adalah pendidik, sebagaimana guru, dosen, pamong belajar, tutor, instruktur, dan fasilitator. Karena konselor adalah

pendidik, maka konseling adalah pendidikan. Pelayanan konseling adalah pelayan pendidikan. Sebagaimana dalam sebuah jurnal diungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi pelanggaran disiplin siswa terhadap layanan bimbingan dan konseling yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kondisi psikologis, dan kondisi jasmani. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat (Ilahi, 2017).

Sebagaimana sekolah-sekolah lainnya, layanan bimbingan konseling sebagian besar telah dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 57 Medan. Di antara layanan tersebut adalah layanan mediasi. Layanan mediasi bertujuan untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bertikai yang tentunya diharapkan pertikaian tersebut segera selesai dan tidak terus berlanjut. Hasil observasi dan wawancara mengenai permasalahan yang dihadapi peserta didik baik itu masalah terlambat datang ke sekolah, seragamnya yang tidak lengkap dipakai seperti; atribut dasi dan peci, motivasi belajar yang rendah, dan adanya jiwa sosial yang suka beregu (*geng-gengan*) sehingga menimbulkan perselisihan. Dalam hasil wawancara juga membahas permasalahan yang ada di sekolah terkait indiscipliner yang mana banyak siswa tidak masuk kelas tanpa keterangan dan terlambat datang ke sekolah sehingga siswa akan tertinggal dengan siswa yang disiplin. Selain itu, ditemukan juga gejala-gejala setelah permasalahan yang ada di sekolah tersebut, di antaranya adalah 1) pihak-pihak yang pernah bertikai masih menunjukkan sikap menjauhi dan memusuhi, 2) pihak-pihak yang pernah mengikuti layanan mediasi masih berusaha menyakiti hati pihak yang lain, 3) pihak-pihak yang pernah mengikuti layanan mediasi masih dalam keadaan tidak tegur sapa.

Masalah-masalah di atas apabila terlambat dalam penanganannya dapat mengakibatkan peserta didik akan rela membuat apapun, maka setelah tiga kali dikonseling, akhirnya peserta didik mulai merasakan kenyamanan kepada guru konselor dan akhirnya semua masalah yang sedang peserta didik rasakan dapat perlahan-lahan mulai teratasi dan peserta didik berbaur dengan sesama temannya. Keberhasilan dari layanan mediasi ini sangat bergantung pada interaksi antara guru (konselor) dan peserta didik. Guru konselor dituntut untuk memahami tugasnya sebagai konselor pada layanan individual ini baik dari tujuan, sisi, teknik dan kegiatan layanan tersebut. Layanan individu dapat direncanakan, misalnya; jika ada peserta didik memiliki masalah, dan peserta didik tersebut susah untuk mengutarakan permasalahannya. Sebagai guru konselor harus memiliki catatan kecil mengenai keseharian peserta didiknya. Layanan konseling individual ini dilaksanakan untuk seluruh masalah peserta didik secara perorangan atau dalam berbagai bidang bimbingan, seperti;

bimbingan pribadi, sosial, dan karier (Lubis, 2012). Seorang guru (konselor) memegang peranan yang sangat penting. Mereka merupakan ujung tombak pelaksana dalam program sekolah. Seorang guru (konselor) selain dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugasnya, juga dituntut untuk memiliki semangat kerja yang tinggi, rasa cinta terhadap tugasnya, kesungguhan, ketekunan dan kesediaan memberikan layanan demi kepentingan peserta didik.

METODE PENGABDIAN

Pengabdian ini merupakan pengabdian kepada masyarakat (PkM) terdiri dari penentuan subjek atau khalayak sasaran, tahapan pelaksanaan kegiatan, serta metode pengumpulan dan analisis data. Bagian ini menjelaskan cara tim mengidentifikasi masalah, menjalankan solusi, dan mengukur tingkat keberhasilan program di lapangan. Metode pengumpulan data menggunakan pengamatan (observasi), wawancara dan studi dokumen. Pengabdian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 57 Medan, Jalan Mustafa, nomor 1, Medan Timur, Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelanggaran Tata Tertib Siswa

Pengidentifikasian berbagai jenis pelanggaran tata tertib yang paling sering terjadi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pelanggaran tata tertib siswa di SMP Muhammadiyah 57 Medan masih didominasi oleh pelanggaran ringan, seperti datang terlambat, tidak mengenakan atribut seragam secara lengkap, kurang disiplin dalam mengerjakan tugas, serta membawa telepon genggam tanpa izin saat proses pembelajaran. Meskipun tidak tergolong pelanggaran berat, frekuensi pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian siswa belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah sebagai bagian dari pembentukan karakter disiplin. Pelanggaran tata tertib bukan hanya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berkaitan dengan proses internalisasi nilai-nilai kedisiplinan yang belum optimal. Menurut Lickona (2021), pendidikan karakter tidak berhenti pada aspek pengetahuan tentang aturan (*moral knowing*), tetapi harus diwujudkan dalam pembiasaan perilaku (*moral action*). Oleh karena itu, tata tertib sekolah perlu dipahami sebagai media pendidikan karakter yang bertujuan membentuk tanggung jawab, kedisiplinan, dan pengendalian diri siswa.

Dalam konteks tersebut, implementasi layanan edukasi di SMP Muhammadiyah 57 Medan menjadi salah satu strategi preventif untuk

meminimalkan pelanggaran tata tertib. Layanan edukasi dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi tata tertib kepada siswa pada awal tahun pelajaran, penyampaian materi kedisiplinan pada kegiatan bimbingan klasikal, pembinaan melalui apel pagi, penguatan nilai-nilai keislaman, serta pemberian nasihat dan pendampingan oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK), wali kelas, dan guru mata pelajaran. Kegiatan tersebut bertujuan membangun pemahaman siswa mengenai pentingnya disiplin sebagai kebutuhan pribadi, bukan semata-mata kewajiban yang harus dipatuhi karena adanya sanksi.

Secara teoritis, Prayitno (2017) menjelaskan bahwa layanan edukasi dalam bimbingan dan konseling berfungsi memberikan informasi, pemahaman, serta pengembangan sikap positif agar peserta didik mampu mengambil keputusan dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Temuan pengabdian menunjukkan bahwa layanan edukasi yang diberikan telah membantu meningkatkan pemahaman siswa mengenai tata tertib sekolah. Namun, masih terdapat siswa yang melakukan pelanggaran berulang, sehingga menunjukkan bahwa pemahaman belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku secara konsisten.

Perspektif pendidikan Islam, implementasi layanan edukasi di SMP Muhammadiyah 57 Medan juga mengintegrasikan nilai-nilai akhlak Islami, seperti tanggung jawab (*amanah*), disiplin (*istiqamah*), dan kepatuhan terhadap aturan sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Al-Attas (1993) bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia yang beradab melalui proses penanaman nilai, bukan hanya transfer pengetahuan. Dengan demikian, hasil pengabdian menunjukkan bahwa implementasi layanan edukasi di SMP Muhammadiyah 57 Medan telah berperan sebagai upaya preventif dalam mengurangi pelanggaran tata tertib siswa. Meskipun efektivitasnya sudah terlihat melalui meningkatnya pemahaman siswa terhadap aturan sekolah, pelaksanaannya masih perlu diperkuat melalui pembinaan yang berkelanjutan, keteladanan guru, kerja sama dengan orang tua, serta evaluasi berkala agar kesadaran disiplin dapat tumbuh dari dalam diri siswa dan tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Pelaksanaan Edukasi dan Pemahaman Aturan

Pelaksanaan edukasi mengenai tata tertib di SMP Muhammadiyah 57 Medan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kegiatan sosialisasi tata tertib pada awal tahun pelajaran, pembinaan pada saat apel pagi, layanan bimbingan klasikal, serta pendampingan oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK) dan wali kelas. Edukasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penyampaian isi peraturan sekolah, tetapi juga menanamkan pemahaman mengenai tujuan tata

tertib sebagai sarana pembentukan karakter disiplin, tanggung jawab, dan akhlak Islami.

Sebagian besar siswa telah memahami aturan sekolah, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan dalam perilaku sehari-hari. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya pelanggaran yang dilakukan secara berulang, seperti keterlambatan, ketidaklengkapan atribut seragam, penggunaan telepon genggam saat pembelajaran, serta kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan sekolah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengetahuan tentang aturan belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi kesadaran pribadi. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi bukan lagi pada aspek kurangnya informasi, melainkan pada proses pembentukan komitmen siswa untuk mengimplementasikan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi kondisi tersebut, sekolah mengoptimalkan implementasi layanan mediasi sebagai bagian dari layanan bimbingan dan konseling. Berdasarkan hasil pengabdian, layanan mediasi diberikan kepada siswa yang mengalami konflik dengan teman sebaya, perselisihan yang berpotensi memicu pelanggaran tata tertib, maupun siswa yang berulang kali melakukan pelanggaran disiplin. Dalam pelaksanaannya, guru BK berperan sebagai mediator yang mempertemukan pihak-pihak yang berselisih, memfasilitasi komunikasi secara objektif, membantu mengidentifikasi akar permasalahan, serta mendorong lahirnya kesepakatan bersama sebagai bentuk penyelesaian konflik.

Analisis hasil pengabdian menunjukkan bahwa implementasi layanan mediasi di SMP Muhammadiyah 57 Medan tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik yang telah terjadi, tetapi juga memiliki nilai edukatif. Selama proses mediasi, siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan perspektif pihak lain, memahami konsekuensi dari perilakunya, serta belajar bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah disepakati. Dengan demikian, layanan mediasi menjadi media pembelajaran sosial yang membantu siswa mengembangkan kemampuan komunikasi, pengendalian emosi, empati, dan penyelesaian masalah secara damai. Dampak tersebut menunjukkan bahwa layanan mediasi tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dalam mencegah munculnya pelanggaran tata tertib yang berulang.

Temuan ini sejalan dengan konsep layanan mediasi yang dikemukakan oleh Prayitno, yang menjelaskan bahwa layanan mediasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami ketidakselarasan hubungan, dengan tujuan membangun kembali hubungan yang harmonis melalui proses komunikasi

yang difasilitasi oleh mediator. Selain menyelesaikan konflik, layanan mediasi juga mengembangkan keterampilan sosial peserta didik sehingga mereka mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri pada masa mendatang.

Dari perspektif pendidikan karakter, hasil pengabdian ini juga mendukung teori Thomas Lickona (2021) yang menyatakan bahwa pembentukan karakter memerlukan integrasi antara pengetahuan moral (*moral knowing*), penghayatan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Edukasi tata tertib yang dipadukan dengan layanan mediasi memberikan kesempatan kepada siswa untuk tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami alasan moral di balik aturan tersebut dan mengimplementasikannya dalam perilaku nyata. Dengan demikian, layanan mediasi berkontribusi terhadap penguatan karakter disiplin, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap hak orang lain. Dalam perspektif pendidikan Islam, implementasi layanan mediasi di SMP Muhammadiyah 57 Medan juga mencerminkan nilai-nilai *ishlah* (perdamaian), *ukhuwah* (persaudaraan), *musyawarah*, dan tanggung jawab. Penyelesaian konflik melalui dialog yang difasilitasi guru BK menjadi sarana pendidikan akhlak yang menanamkan sikap saling menghormati, saling memaafkan, dan menjaga keharmonisan hubungan antarsiswa. Oleh karena itu, layanan mediasi tidak hanya mendukung terciptanya ketertiban sekolah, tetapi juga memperkuat pembentukan karakter Islami yang menjadi salah satu tujuan pendidikan di SMP Muhammadiyah 57 Medan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi layanan mediasi di SMP Muhammadiyah 57 Medan telah menjadi strategi edukatif yang efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap tata tertib sekolah sekaligus mengurangi potensi pelanggaran yang bersumber dari konflik interpersonal. Efektivitas layanan ini semakin optimal ketika didukung oleh konsistensi penegakan tata tertib, keteladanan guru, keterlibatan orang tua, dan budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai disiplin serta penyelesaian masalah secara dialogis.

Proses Implementasi Layanan Mediasi

Implementasi layanan mediasi di SMP Muhammadiyah 57 Medan dilaksanakan secara sistematis sebagai bagian dari layanan Bimbingan dan Konseling (BK) untuk menyelesaikan konflik antarsiswa sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap tata tertib sekolah. Layanan mediasi tidak hanya diberikan ketika terjadi pelanggaran disiplin, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana edukatif untuk mencegah munculnya konflik yang dapat berkembang menjadi pelanggaran tata tertib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah, proses implementasi layanan mediasi diawali dengan identifikasi kasus, yaitu guru BK menerima laporan dari guru mata pelajaran, wali kelas, atau siswa mengenai adanya konflik maupun pelanggaran tata tertib. Pada tahap ini guru BK melakukan asesmen awal untuk mengetahui bentuk pelanggaran, pihak-pihak yang terlibat, faktor penyebab, serta tingkat urgensi penyelesaian masalah. Analisis ini penting agar layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan tidak hanya berfokus pada akibat, tetapi juga akar permasalahan.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan mediasi, yaitu guru BK bertindak sebagai mediator yang netral dengan mempertemukan pihak-pihak yang mengalami konflik. Selama proses mediasi, setiap siswa diberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan kronologi permasalahan, mengemukakan pendapat, dan menyampaikan perasaannya tanpa adanya tekanan. Guru BK kemudian memfasilitasi dialog yang konstruktif, mengarahkan siswa untuk memahami dampak perilaku yang dilakukan terhadap dirinya maupun orang lain, serta membimbing mereka menemukan alternatif penyelesaian yang disepakati bersama. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan dialogis ini membuat siswa lebih terbuka dalam menerima masukan dibandingkan apabila hanya diberikan hukuman.

Selanjutnya dilakukan tahap edukasi dan penguatan pemahaman aturan. Pada tahap ini guru BK tidak hanya menegaskan kembali isi tata tertib sekolah, tetapi juga menjelaskan tujuan diberlakukannya aturan sebagai upaya membentuk disiplin, tanggung jawab, dan sikap saling menghormati. Edukasi juga dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman, seperti amanah, kejujuran, ukhuwah, dan tanggung jawab, sehingga siswa memahami bahwa menaati tata tertib merupakan bagian dari pembentukan akhlak, bukan sekadar kewajiban administratif sekolah.

Tahap terakhir adalah monitoring dan tindak lanjut. Guru BK bersama wali kelas memantau perubahan perilaku siswa melalui observasi di kelas, komunikasi dengan guru mata pelajaran, serta koordinasi dengan orang tua apabila diperlukan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa yang mengikuti layanan mediasi mengalami perubahan perilaku, seperti berkurangnya pelanggaran yang sama, meningkatnya kemampuan mengendalikan emosi, serta membaiknya hubungan dengan teman sebaya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa siswa yang memerlukan pendampingan lanjutan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga dan pergaulan.

Analisis hasil pengabdian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi layanan mediasi di SMP Muhammadiyah 57 Medan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan guru BK dalam memfasilitasi penyelesaian konflik, tetapi juga oleh konsistensi sekolah dalam mengintegrasikan layanan mediasi dengan program pendidikan karakter. Layanan mediasi menjadi media pembelajaran sosial yang membantu siswa belajar berkomunikasi secara efektif, menghargai perbedaan pendapat, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, dan menyelesaikan konflik secara damai. Dengan demikian, layanan mediasi memiliki fungsi preventif, kuratif, sekaligus developmental dalam pembentukan karakter peserta didik.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Prayitno (2017) yang menyatakan bahwa layanan mediasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang mempertemukan dua pihak atau lebih yang sedang mengalami ketidakcocokan dengan tujuan membangun kembali hubungan yang harmonis melalui peran konselor sebagai mediator. Keberhasilan layanan mediasi tidak hanya diukur dari selesainya konflik, tetapi juga dari perubahan hubungan antarpihak menjadi lebih positif dan kondusif. Hasil pengabdian ini juga mendukung teori Tohirin yang menegaskan bahwa tujuan utama layanan mediasi adalah membantu peserta didik mencapai hubungan interpersonal yang sehat melalui penyelesaian konflik secara dialogis dan edukatif. Oleh karena itu, layanan mediasi merupakan salah satu strategi yang efektif dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, tertib, dan kondusif bagi proses pembelajaran.

Selain itu, temuan pengabdian relevan dengan teori pendidikan karakter Thomas Lickona yang menekankan bahwa pembentukan karakter harus mencakup tiga dimensi, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Implementasi layanan mediasi di SMP Muhammadiyah 57 Medan telah mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut melalui pemberian pemahaman tentang aturan sekolah, penumbuhan kesadaran moral selama proses dialog, serta pembiasaan perilaku disiplin melalui komitmen hasil mediasi. Dengan demikian, layanan mediasi tidak hanya menyelesaikan konflik sesaat, tetapi juga membentuk karakter siswa agar mampu mengelola konflik secara mandiri dan bertanggung jawab.

Dari perspektif pendidikan Islam, implementasi layanan mediasi mencerminkan nilai *ishlah* (perdamaian), *syura* (musyawarah), dan *ukhuwah* (persaudaraan). Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui penyelesaian konflik secara damai, penghormatan terhadap hak setiap individu untuk didengar, serta penumbuhan sikap saling memaafkan. Oleh karena itu, implementasi layanan mediasi di SMP Muhammadiyah 57 Medan tidak hanya berfungsi sebagai layanan bimbingan dan konseling, tetapi juga menjadi instrumen

pendidikan karakter Islami yang mendukung terwujudnya budaya sekolah yang disiplin, harmonis, dan berakhlak mulia.

Efektivitas Layanan Mediasi dalam Mengatasi Pelanggaran

Implementasi layanan mediasi di SMP Muhammadiyah 57 Medan memberikan kontribusi positif dalam mengurangi pelanggaran tata tertib siswa, khususnya pelanggaran yang dipicu oleh konflik antarsiswa, kesalahpahaman, maupun rendahnya kesadaran terhadap aturan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Bimbingan dan Konseling (BK), kepala sekolah, dan wali kelas, siswa yang mengikuti layanan mediasi menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik, seperti berkurangnya frekuensi pelanggaran yang sama, meningkatnya kemampuan mengendalikan emosi, serta memperbaiki hubungan sosial dengan teman maupun guru.

Analisis terhadap temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas layanan mediasi tidak hanya terlihat dari menurunnya jumlah pelanggaran, tetapi juga dari perubahan cara berpikir dan sikap siswa terhadap tata tertib sekolah. Sebelum mengikuti mediasi, sebagian siswa cenderung memandang tata tertib sebagai aturan yang bersifat memaksa dan identik dengan pemberian sanksi. Namun setelah mengikuti proses mediasi, siswa mulai memahami bahwa tata tertib berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan kondusif. Perubahan cara pandang ini menunjukkan bahwa layanan mediasi berhasil mengembangkan kesadaran intrinsik siswa untuk mematuhi aturan, bukan sekadar karena takut menerima hukuman.

Efektivitas tersebut dipengaruhi oleh proses layanan mediasi yang dilaksanakan secara bertahap. Guru BK terlebih dahulu mengidentifikasi akar permasalahan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, kemudian memfasilitasi dialog yang terbuka dan objektif. Pada tahap ini setiap siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memahami perspektif pihak lain, serta menyusun kesepakatan penyelesaian bersama. Setelah proses mediasi selesai, guru BK melakukan monitoring melalui koordinasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua untuk memastikan perubahan perilaku siswa berlangsung secara berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan layanan mediasi tidak hanya bergantung pada proses penyelesaian konflik, tetapi juga pada tindak lanjut yang dilakukan sekolah.

Temuan pengabdian tersebut sejalan dengan teori Prayitno (2018), yang menjelaskan bahwa layanan mediasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang mempertemukan dua pihak atau lebih yang sedang mengalami ketidakcocokan dengan tujuan membangun kembali hubungan yang harmonis melalui peran konselor sebagai mediator. Keberhasilan layanan mediasi tidak

hanya diukur dari berakhirnya konflik, tetapi juga dari terbentuknya hubungan yang lebih positif, konstruktif, dan berkelanjutan. Hasil pengabdian ini juga memperkuat pendapat Tohirin (2013) yang menyatakan bahwa tujuan utama layanan mediasi adalah menciptakan hubungan yang positif dan kondusif di antara pihak-pihak yang berselisih sehingga peserta didik mampu menyelesaikan masalah secara damai dan bertanggung jawab. Dengan demikian, layanan mediasi tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial yang mengembangkan kemampuan komunikasi, empati, dan pengendalian diri siswa.

Dari perspektif pendidikan karakter, temuan pengabdian mendukung teori Thomas Lickona (1991; 2021) yang menyatakan bahwa pembentukan karakter berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu **moral knowing** (mengetahui nilai yang benar), *moral feeling* (menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap nilai tersebut), serta *moral action* (mewujudkannya dalam perilaku nyata). Implementasi layanan mediasi di SMP Muhammadiyah 57 Medan telah mencerminkan ketiga tahapan tersebut. Guru BK memberikan pemahaman mengenai aturan sekolah, membangun kesadaran siswa terhadap dampak perilakunya melalui proses refleksi selama mediasi, kemudian mengarahkan siswa untuk membuktikan komitmennya melalui perubahan perilaku setelah mediasi selesai. Dengan demikian, layanan mediasi menjadi bagian dari proses pendidikan karakter yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membentuk disiplin dan tanggung jawab siswa.

Dalam perspektif pendidikan Islam, efektivitas layanan mediasi juga tercermin melalui penerapan nilai-nilai *ishlah* (perdamaian), *syura* (musyawarah), *ukhuwah* (persaudaraan), dan *amanah* (tanggung jawab). Penyelesaian pelanggaran tata tertib dilakukan melalui dialog, saling mendengarkan, saling memaafkan, dan mencapai kesepakatan bersama tanpa merendahkan salah satu pihak. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Al-Attas (1993), yaitu membentuk insan beradab (*insan adabi*) yang mampu bertindak sesuai dengan nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, layanan mediasi di SMP Muhammadiyah 57 Medan efektif dalam mengatasi pelanggaran tata tertib karena tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga mengedepankan proses edukasi, refleksi, dan pembinaan karakter. Efektivitas tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman siswa terhadap aturan sekolah, membaiknya hubungan interpersonal, serta berkurangnya kecenderungan melakukan pelanggaran yang sama. Oleh karena itu, layanan mediasi dapat dipandang sebagai strategi preventif dan kuratif yang

mendukung terciptanya budaya sekolah yang disiplin, harmonis, dan berkarakter Islami.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran tata tertib siswa di SMP Muhammadiyah 57 Medan masih didominasi oleh pelanggaran ringan yang menunjukkan belum optimalnya internalisasi nilai disiplin pada sebagian siswa. Upaya edukasi dan pemahaman aturan telah dilaksanakan melalui sosialisasi tata tertib, bimbingan klasikal, pembinaan oleh guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran, sehingga mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Implementasi layanan mediasi dilaksanakan secara sistematis melalui identifikasi masalah, proses mediasi, edukasi, serta tindak lanjut, sehingga tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik, tetapi juga membentuk karakter, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan menumbuhkan kesadaran siswa untuk mematuhi aturan sekolah. Secara keseluruhan, layanan mediasi terbukti efektif dalam mengurangi pelanggaran tata tertib, memperbaiki hubungan interpersonal, serta memperkuat budaya disiplin dan karakter Islami di lingkungan SMP Muhammadiyah 57 Medan melalui kolaborasi antara guru BK, kepala sekolah, wali kelas, guru, dan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Desmita. (2008). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ilahi, R. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Disiplin Siswa dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling. *Education*, 86-105.
- Lickona, T. (2013). *Mendidik untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggung Jawab* (Terj. Juma Abdu Wamaungo). Jakarta: Bumi Aksara.
- Lickona, T. (2021). *Character Matters* (edisi terbaru). New York: Simon & Schuster.
- Lubis, L. (2012). *Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama.
- Mulyasa, E. (2020). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prayitno, & Amti, E. (2018). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Prayitno, dkk. (2017). *Layanan Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prayitno. (2018). *Konseling Profesional yang Berhasil: Layanan dan Kegiatan*
- Suhertina. (2008). *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Suska Press.
- Sukardi, D. K. (2008). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tohirin. (2015). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yusuf, S., & Nurihsan, A. J. (2019). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya